

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengungkapan pada laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) saat ini bukan hal yang baru, melainkan telah menjadi bagian integral dalam praktik bisnis yang berkembang pesat. Laporan keberlanjutan pertama kali diperkenalkan di Prancis dan bersifat sukarela, namun perkembangan regulasi menunjukkan bahwa laporan ini tidak lagi dipandang sekadar sebagai kewajiban administratif, tetapi berfungsi sebagai alat pengungkapan yang tidak hanya mencerminkan kinerja perusahaan di masa lampau, tetapi juga berfokus pada nilai jangka panjang di masa depan (Barker, 2025).

Laporan keberlanjutan merupakan praktik untuk menilai dan melaporkan aktivitas perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi seluruh pemangku kepentingan mengenai pencapaian kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan memuat informasi yang mengungkapkan apa saja dampak sosial, ekonomi, serta lingkungan akibat dari aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan, sekaligus menyediakan data yang relevan bagi para pemangku kepentingan agar dapat mengambil keputusan secara optimal mengenai kinerja perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan (Dewi & Widyawati, 2023).

Laporan keberlanjutan juga memiliki keterkaitan erat dengan Sustainable Development Goals (SDGs), yaitu agenda global yang bertujuan mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perusahaan sebagai pelaku ekonomi memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian SDGs melalui transparansi dan peningkatan kualitas laporan keberlanjutan yang disusun.

Pada awalnya, pengungkapan laporan keberlanjutan bersifat sukarela dan terbatas pada sejumlah perusahaan yang memahami pentingnya transparansi. Namun, telah berkembang menjadi suatu kewajiban yang semakin diperkuat oleh kebijakan dan regulasi di banyak negara. Contohnya, di Amerika Serikat, yang pada tahun 2010 mengeluarkan peraturan dari *Securities and Exchange Commission* (SEC) mewajibkan perusahaan publik untuk mengungkapkan informasi terkait keberlanjutan. Negara-negara di Kawasan Asia, seperti Jepang, Cina, dan India telah menetapkan kewajiban serupa. Sebagaimana negara-negara

lainnya yang mulai memperkenalkan regulasi terkait laporan keberlanjutan, Indonesia juga mengambil langkah konkret melalui regulasi.

Pada tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan POJK No. 51/POJK.03/2017 yang mengatur tentang penerapan Keuangan Berkelanjutan oleh Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang mewajibkan pelaporan keberlanjutan menjadi bagian dari laporan tahunan yang dikeluarkan. Laporan ini harus memuat informasi terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), serta strategi keberlanjutan dan kinerja yang relevan. Kewajiban ini diperkuat secara teknis melalui SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021 mengatur mengenai bentuk serta isi laporan tahunan emiten dan perusahaan publik, termasuk integrasi atau pelampiran laporan keberlanjutan secara terstruktur dan standar. Regulasi-regulasi ini mengukuhkan posisi laporan keberlanjutan menjadi aspek yang melekat pada praktik bisnis yang bertanggung jawab dan transparan di Indonesia.

Perubahan tersebut juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi di era Revolusi Industri 4.0 yang telah meningkatkan akses informasi bagi masyarakat, yang pada gilirannya memudahkan mereka memahami dan menilai dampak sosial maupun lingkungan yang ditimbulkan perusahaan. Situasi ini semakin mendorong perusahaan untuk memperbaiki laporan keberlanjutannya, sebagai respons terhadap tuntutan regulasi dan harapan masyarakat. Akibatnya, terdapat dorongan kuat dari masyarakat agar perusahaan lebih bertanggung jawab dan transparan dalam mengungkapkan dampak dari setiap kegiatannya.

Dorongan ini direspons oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tahun 2024 yang telah meluncurkan draft standar PSPK 1 dan PSPK 2, sebagai bagian dari *Roadmap* Standar Pengungkapan Keberlanjutan Indonesia. Draft ini disusun merujuk pada standar internasional yang diterbitkan *International Sustainability Standards Board* (ISSB), serta berada di bawah naungan *IFRS Foundation* (*International Financial Reporting Standards*) yaitu pedoman dalam Penyajian laporan keuangan secara global yang digunakan secara luas untuk mendorong transparansi dan keterbandingan laporan keuangan antarnegara.

Penelitian mengenai laporan keberlanjutan sangat penting, karena laporan tersebut merupakan instrumen utama yang memungkinkan para pemangku kepentingan menilai secara jelas dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan pada aktivitas perusahaan. Dengan meningkatnya perhatian terhadap permasalahan sosial dan lingkungan, kualitas laporan keberlanjutan juga turut berkembang.

Selain itu, pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian didasarkan pada karakteristik sektor ini yang termasuk dalam kelompok industri sensitif lingkungan. Perusahaan manufaktur memiliki tingkat risiko dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang relatif tinggi akibat aktivitas produksi, penggunaan sumber daya alam, pengelolaan limbah, emisi, serta keterlibatan tenaga kerja dalam skala besar. Tingginya potensi dampak tersebut menyebabkan perusahaan manufaktur berada dalam sorotan yang lebih besar dari masyarakat, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Kondisi ini menuntut perusahaan manufaktur untuk tidak hanya menyusun laporan keberlanjutan, tetapi juga memastikan kualitas laporan keberlanjutan yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi dan dampak operasional perusahaan. Oleh karena itu, sektor manufaktur dipandang relevan untuk mengkaji kualitas laporan keberlanjutan, keberadaan *assurance sustainability report*, serta tekanan pemangku kepentingan sebagai faktor-faktor yang memengaruhi transparansi dan akuntabilitas pelaporan keberlanjutan.

Yuliandhari & Citta (2023) mengungkapkan bahwa laporan keberlanjutan yang berkualitas menggambarkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta mempermudah pemangku kepentingan dalam memahami dan mengambil keputusan yang lebih baik. Dalam konteks ini, laporan keberlanjutan yang berkualitas menjadi alat yang digunakan perusahaan untuk mengomunikasikan mengenai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitasnya, sekaligus menunjukkan upaya yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan keberlanjutan jangka panjang.

Seiring dengan meningkatnya perhatian global terhadap isu-isu keberlanjutan, perusahaan dituntut untuk menyajikan informasi secara lebih terbuka, menyeluruh, dan bertanggung jawab dalam laporan yang diterbitkan. Namun demikian, kualitas laporan keberlanjutan masih sering dipertanyakan akibat munculnya praktik greenwashing, yaitu penyajian informasi keberlanjutan yang tidak didukung bukti memadai dan lebih bersifat simbolis semata (Freshtriana & Kim, 2025). Kondisi ini menimbulkan keraguan terhadap objektivitas dan keandalan informasi yang disampaikan perusahaan, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan.

Permasalahan mengenai kualitas laporan keberlanjutan masih menjadi sorotan, baik di tingkat global maupun nasional. Di tingkat internasional, kasus Wintershall Dea di Jerman menjadi perhatian setelah otoritas setempat melakukan

investigasi atas dugaan penyajian informasi yang tidak akurat dalam laporan manajemen tahun 2022, khususnya terkait pengungkapan dampak iklim dan lingkungan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun perusahaan telah menerbitkan laporan keberlanjutan, aspek kualitas seperti akurasi data, kelengkapan informasi, dan kepatuhan regulasi tetap dapat dipertanyakan (Reuters, 2024)

Di Indonesia, kasus yang menimpa Harita Group, salah satu perusahaan nikel terbesar yang memasok industri kendaraan listrik global, hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat transparansi masih rendah. Berdasarkan laporan *The Guardian* (2025) mengungkap adanya kandungan berbahaya kromium heksavalen (Cr_6) dalam sumber air minum masyarakat di Pulau Obi, Maluku Utara, dengan kadar melebihi ambang batas aman. Informasi tersebut tidak diungkapkan dalam laporan maupun pernyataan publik perusahaan, bahkan dibantah secara resmi oleh perusahaan melalui pernyataan publik. Ketidaksesuaian antara data teknis internal dengan informasi publik ini memperlihatkan bahwa kualitas laporan keberlanjutan masih menghadapi masalah serius dari sisi transparansi (The Guardian, 2025)

Fenomena lain disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pelaporan keberlanjutan. Berdasarkan data terbaru, sekitar 17% perusahaan di pasar modal Indonesia belum menyampaikan laporan keberlanjutan meskipun kewajiban tersebut telah diatur sejak 2017. Bahkan, di antara emiten besar yang sudah menyampaikan laporan, keterbukaan informasi belum merata, khususnya terkait pengungkapan emisi karbon dan dampak lingkungan. Hal ini menegaskan bahwa permasalahan tidak terbatas pada kepatuhan administratif semata, melainkan juga berkaitan dengan kualitas, kedalaman, dan keterandalan informasi yang disajikan (CNBC Indonesia, 2024)

Dalam konteks tersebut, *assurance sustainability report* menjadi mekanisme yang memiliki kedekatan langsung dengan kualitas laporan keberlanjutan karena berfungsi sebagai bentuk verifikasi independen atas informasi yang diungkapkan perusahaan. Assurance sustainability report merupakan pernyataan dari auditor independen yang bertujuan memastikan bahwa laporan keberlanjutan disusun secara objektif, bebas bias, dan sesuai standar yang berlaku (Aly & Badawy, 2024). Keberadaan *assurance sustainability report* memperkuat kredibilitas laporan dengan meningkatkan transparansi dan

keandalan informasi lingkungan, sosial, dan tata kelola yang disampaikan perusahaan kepada pemangku kepentingan, sekaligus meminimalkan potensi penyajian informasi yang menyesatkan (Nagu et al. 2025).

Nasution & Meiden (2024) menunjukkan bahwa keberadaan *assurance sustainability report* mampu meningkatkan kredibilitas laporan keberlanjutan melalui pengurangan asimetri informasi dan peningkatan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan demikian, *assurance sustainability report* tidak hanya berperan sebagai pelengkap administratif, tetapi menjadi elemen strategis dalam menjamin kualitas laporan keberlanjutan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini *assurance sustainability report* diposisikan sebagai variabel independen utama yang diduga memiliki pengaruh langsung terhadap kualitas laporan keberlanjutan.

Kinerja keuangan merupakan faktor penting lain yang mendukung kualitas laporan keberlanjutan. Faktor ini berhubungan langsung dengan kemampuan perusahaan untuk berinvestasi dalam keberlanjutan dan menyusun laporan yang berkualitas. Dengan hasil kinerja keuangan yang baik, perusahaan mampu menyediakan lebih banyak dana untuk mengalokasikan anggaran bagi verifikasi independen, pengembangan teknologi ramah lingkungan, dan program tanggung jawab sosial. Silvana & Khomsyiah (2023) berpendapat bahwa perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik lebih mampu menyusun laporan yang lebih lengkap dan memenuhi standar internasional.

Tekanan pemangku kepentingan sendiri merujuk pada bentuk pengaruh yang berasal dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas dan hasil perusahaan, baik dari lingkungan internal ataupun lingkungan eksternal. Menurut Bello-Pintado et al. (2023) tekanan ini dapat berbentuk harapan, tuntutan, atau regulasi yang mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik yang selaras dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk dalam pelaporan keberlanjutan dan tekanan ini dapat diukur melalui berbagai aspek, seperti tekanan dari lingkungan, konsumen, investor, hingga pemerintah. Tekanan ini tidak hanya mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi lebih terbuka tentang dampak sosial dan lingkungannya, tetapi juga memperkuat pentingnya *assurance sustainability report* dan kinerja keuangan yang baik.

Sementara itu, *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan mekanisme tata kelola perusahaan yang berfungsi sebagai sistem pengawasan dan pengendalian untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan sesuai dengan

prinsip-prinsip tata kelola yang baik. GCG mencakup aspek-aspek seperti komposisi dewan direksi independen, komite audit, dan praktik transparansi dalam pengambilan keputusan, Herawaty et al. (2021) berpendapat bahwa perusahaan dengan penerapan GCG yang baik dan efektif lebih cenderung menghasilkan laporan yang transparan dan memenuhi standar internasional serta hal ini dapat meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan dengan cara memastikan perusahaan mematuhi standar yang ditentukan oleh regulator dan memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan

Dengan demikian GCG pada penelitian ini digunakan sebagai variabel moderasi, yang berperan memperjelas hubungan antara *assurance sustainability report*, kinerja keuangan dan tekanan pemangku kepentingan terhadap kualitas laporan keberlanjutan.

Secara teoritis, hubungan antar variabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui Teori Legitimasi dan Teori Agensi. Teori Legitimasi menekankan bahwa perusahaan perlu mempertahankan keberterimaan sosial dengan menyajikan informasi yang transparan mengenai dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari aktivitas operasionalnya. Dalam konteks ini, perusahaan terdorong untuk meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan sebagai bentuk upaya memperoleh dan mempertahankan legitimasi dari masyarakat serta pemangku kepentingan. Tekanan pemangku kepentingan menjadi faktor pendorong penting, karena semakin kuat tuntutan dari publik, investor, regulator, maupun konsumen, semakin besar dorongan perusahaan untuk menyajikan laporan keberlanjutan yang lebih kredibel, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan demi menjaga legitimasi sosialnya.

Sementara itu, berdasarkan Teori Agensi, terdapat potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi antara manajemen (agen) dan pemangku kepentingan (prinsipal). Dalam hubungan ini, manajemen memiliki kecenderungan untuk menyajikan informasi yang menguntungkan citra perusahaan, sehingga menimbulkan potensi bias dalam laporan keberlanjutan. Oleh karena itu, *assurance sustainability report* dari pihak independen bertindak sebagai mekanisme verifikasi eksternal yang berfungsi mengurangi asimetri informasi, memastikan objektivitas pelaporan, serta meningkatkan kredibilitas dan kualitas laporan keberlanjutan.

Di sisi lain, Good Corporate Governance (GCG) dalam penelitian ini tercermin melalui peran komite audit sebagai mekanisme pengawasan internal

yang memastikan kualitas proses pelaporan perusahaan. Komite audit berfungsi mengawasi penyusunan laporan keuangan dan non-keuangan, termasuk laporan keberlanjutan, agar disajikan secara transparan, akurat, dan sesuai dengan standar yang berlaku. Melalui fungsi pengawasan tersebut, komite audit mendorong peningkatan akuntabilitas manajemen serta memperkuat sistem pengendalian internal perusahaan, sehingga turut mendukung terciptanya laporan keberlanjutan yang berkualitas.

Penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung kajian ini, di antaranya berasal dari Alfaiz & Aryati (2019); Zain et al. (2021); Erin et al. (2022); Ekaputri & Eriandani (2022); Silvana & Khomsyiah (2023); Darmawan & Idawati (2024); Putu et al. (2024); Suheri (2024); Amatullah et al. (2025). Alfaiz & Aryati (2019) menunjukkan bahwa hasil kinerja keuangan yang dinilai menggunakan indikator profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Zain et al. (2021) serta Silvana & Khomsyiah (2023) yang menyimpulkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh terhadap kualitas laporan keberlanjutan.

Selanjutnya García-Sánchez et al. (2022), Hazaea et al. (2022), serta Pizzi et al. (2024) mengungkapkan bahwa *assurance sustainability report* berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan verifikasi independen mampu meningkatkan kredibilitas, transparansi, serta keandalan informasi keberlanjutan yang diungkapkan perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkan menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan standar pelaporan keberlanjutan. Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Erin et al. (2022) yang menyatakan bahwa keberadaan *assurance sustainability report* tidak selalu mencerminkan peningkatan kualitas substantif laporan keberlanjutan, karena dalam beberapa kasus assurance masih bersifat simbolik dan lebih menekankan pada kepatuhan formal dibandingkan kualitas pengungkapan yang sesungguhnya.

Selain itu, Suheri (2024) menemukan bahwa tekanan pemangku kepentingan tidak menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan, sedangkan Darmawan & Idawati (2024) serta Putu et al. (2024) menunjukkan bahwa tekanan pemangku kepentingan dan struktur kepemilikan mempengaruhi kualitas laporan keberlanjutan.

Penelitian ini juga mengambil rujukan yang dilakukan oleh Darmawan & Sudana (2022). Perbedaan dengan penelitian ini yaitu pada fokus industri,

sedangkan penelitian sebelumnya mengambil sampel semua jenis perusahaan di bursa efek Indonesia. sementara itu, studi ini berfokus pada sektor manufaktur serta menggunakan *assurance sustainability report*, kinerja keuangan dan *Good Corporate Governance* sebagai moderasi.

Berdasarkan fenomena tersebut, perbedaan hasil penelitian terdahulu, dan pembaruan penelitian, peneliti terdorong untuk mengkaji faktor-faktor yang dapat memengaruhi kualitas laporan keberlanjutan tersebut, antara lain *assurance sustainability report*, kinerja keuangan dan tekanan pemangku kepentingan, dengan *Good Corporate Governance* sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan dalam latar belakang, maka permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah *Assurance sustainability report* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan?
2. Apakah Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan?
3. Apakah Tekanan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Pressure*) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan?
4. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) mampu memengaruhi hubungan *Assurance sustainability report* terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan?
5. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) mampu memengaruhi hubungan kinerja keuangan terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan?
6. Apakah *Good Corporate Governance* (GCG) mampu memengaruhi hubungan tekanan pemangku kepentingan terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, sebagai berikut.

1. Menguji Pengaruh *Assurance sustainability report* terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan.
2. Menguji Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan.

3. Menguji Pengaruh Tekanan Pemangku Kepentingan (*Stakeholder Pressure*) terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan.
4. Menguji Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memengaruhi hubungan *Assurance sustainability report* terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan.
5. Menguji Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memengaruhi hubungan kinerja keuangan terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan.
6. Menguji Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dalam memengaruhi hubungan tekanan pemangku kepentingan terhadap Kualitas Laporan Keberlanjutan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, khususnya terkait dengan laporan keberlanjutan. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi teoretis untuk memahami pengaruh *assurance sustainability report*, kinerja keuangan dan tekanan pemangku kepentingan terhadap kualitas laporan keberlanjutan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan, melalui pemahaman atas faktor-faktor yang memengaruhinya.

3. Kegunaan Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang mendukung praktik pelaporan keberlanjutan dan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan kajian lebih mendalam dalam topik serupa.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2024. Sektor manufaktur dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan isu lingkungan dan sosial, yang menjadikannya relevan dalam mengkaji kualitas laporan keberlanjutan. Data penelitian diperoleh dari laporan keberlanjutan yang telah dipublikasikan oleh perusahaan, yang mencakup variabel *assurance sustainability*

report, kinerja keuangan, tekanan pemangku kepentingan, serta *Good Corporate Governance* (GCG)

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini merujuk pada Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Program Magister dan Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Adapun sistematika penulisan terdiri atas tujuh bab, yaitu sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, diuraikan teori-teori yang relevan dan mendasari penelitian yang dilakukan. Bab ini juga mencakup analisis pustaka yang memperkaya pemahaman tentang permasalahan yang diteliti.

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

Bab ini memuat uraian mengenai teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian, ringkasan hasil-hasil penelitian terdahulu, penyusunan kerangka konseptual, serta perumusan hipotesis penelitian.

BAB IV METODE PENELITIAN

Menjelaskan metode penelitian yang digunakan, mencakup rancangan penelitian, lokasi dan waktu pelaksanaan, populasi serta teknik pengambilan sampel. Bab ini juga menguraikan jenis dan sumber data yang meliputi data primer maupun sekunder, serta teknik pengumpulan data yang relevan. Selain itu, definisi operasional dari variabel penelitian, pengukuran variabel, dan metode analisis data akan dijelaskan untuk memastikan penelitian ini memiliki kerangka metodologi yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian beserta pembahasannya. Apabila dirasa perlu untuk memisahkan secara jelas antara hasil dan pembahasan, maka keduanya dapat disusun dalam bab yang terpisah.

BAB VI PEMBAHASAN

Tujuan dari pembahasan adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, menafsirkan hasil temuan, serta mengaitkan temuan tersebut dengan teori-teori yang telah mapan. Pembahasan juga dapat mencakup modifikasi teori yang ada atau penyusunan teori baru. Kualitas sebuah tesis atau

disertasi tercermin dari kemampuan penulis dalam mengaitkan hasil penelitiannya dengan teori yang relevan, dan menunjukkan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

BAB VII PENUTUP

Kesimpulan merupakan suatu pernyataan singkat dan tepat yang merupakan penjabaran dari hasil penelitian dan pembahasan, serta merupakan hasil akhir dari pengujian hipotesis atau pencapaian tujuan penelitian. Kesimpulan merangkum seluruh hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, dengan susunan yang sebaiknya mengikuti urutan rumusan masalah, tujuan, hasil, dan pembahasan, guna menjaga konsistensi dan keterpaduan antarbagian dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Teori Legitimasi

Teori legitimasi merupakan salah satu kerangka teoretis yang sering digunakan untuk menjelaskan praktik pengungkapan informasi sosial dan lingkungan oleh perusahaan, termasuk dalam penyusunan laporan keberlanjutan. Teori ini menyatakan bahwa kelangsungan operasional perusahaan tidak hanya mengandalkan kinerja ekonomi, melainkan juga mempertimbangkan tingkat penerimaan dan dukungan masyarakat luas (Suchman, 1995). Ketika terjadi ketidaksesuaian antara aktivitas perusahaan dan nilai atau norma sosial yang berlaku, legitimasi perusahaan akan terancam. Dalam situasi tersebut, perusahaan akan terdorong untuk mengadopsi berbagai strategi untuk memulihkan atau mempertahankan legitimasi sosialnya, salah satunya melalui pelaporan keberlanjutan yang disusun secara transparan, relevan, dan kredibel.

Namun, legitimasi tidak hanya dibangun melalui laporan tertulis, tetapi juga dari bagaimana masyarakat menilai tanggung jawab sosial yang ditunjukkan oleh perusahaan dalam praktik sehari-hari. Dalam konteks legitimasi, hubungan antara perusahaan dan masyarakat menyerupai suatu interaksi berkelanjutan yang bersifat timbal balik. Ketika perusahaan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab, maka masyarakat sebagai penerima manfaat cenderung merasa puas terhadap keberadaan perusahaan (Temirova, 2024). Kepuasan tersebut secara alamiah akan membentuk rasa percaya terhadap perusahaan. Jika kepuasan dan kepercayaan ini terus terjaga, maka akan berkembang menjadi loyalitas, yaitu bentuk dukungan sosial yang lebih kuat dan berkelanjutan terhadap eksistensi perusahaan. Oleh karena itu, legitimasi sosial bukanlah kondisi yang bersifat statis, melainkan terbentuk melalui proses sosial yang berlangsung secara dinamis dan harus dirawat secara konsisten oleh perusahaan melalui perilaku etis dan pelaporan yang akuntabel.

Dalam beberapa dekade terakhir, kualitas laporan keberlanjutan telah menjadi sorotan, karena tidak sedikit perusahaan yang hanya menyampaikan laporan secara simbolik (*symbolic disclosure*), tanpa substansi yang mencerminkan tanggung jawab nyata. Teori legitimasi menjelaskan bahwa

perusahaan yang berada di bawah tekanan sosial tinggi, seperti akibat isu lingkungan, konflik sosial, atau tuduhan *greenwashing*, akan lebih terdorong untuk meningkatkan kualitas pengungkapan informasinya demi memulihkan persepsi positif dari masyarakat (Vaio et al., 2025). Dalam konteks ini, laporan keberlanjutan berfungsi sebagai alat komunikasi strategis untuk menyampaikan komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai keberlanjutan yang menjadi tuntutan publik.

Kualitas laporan keberlanjutan tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap standar formal, melainkan juga dari kelengkapan, akurasi, relevansi, keterbandingan, serta kemanfaatannya bagi pemangku kepentingan. Menurut Cardillo & Basso (2025), perusahaan yang mengalami tekanan legitimasi akibat isu lingkungan cenderung menyusun laporan keberlanjutan yang lebih menyeluruh, menggunakan kerangka kerja *Global Reporting Initiative* (GRI), serta melampirkan *assurance sustainability report* dari pihak independen untuk meningkatkan kredibilitas laporan. Upaya ini mencerminkan strategi perusahaan dalam membangun kepercayaan dan mempertahankan loyalitas sosial.

Lebih lanjut, tekanan dari pemangku kepentingan merupakan salah satu pemicu utama dalam logika teori legitimasi. Masyarakat lokal, pemerintah, LSM, investor, dan media massa merupakan pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap reputasi dan eksistensi perusahaan. Guidi et al. (2025) menyatakan bahwa semakin besar tekanan yang diterima perusahaan, semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan, baik dalam cakupan indikator, keterlibatan pihak ketiga, maupun transparansi data.

Untuk mendukung persepsi tersebut, perusahaan juga semakin terdorong untuk memenuhi standar kualitas pelaporan yang diakui secara internasional. Kualitas laporan keberlanjutan juga dipengaruhi oleh strategi legitimasi yang bersifat proaktif. Bukan sekadar reaksi terhadap tekanan yang timbul, strategi ini menunjukkan bahwa perusahaan telah menginternalisasi nilai keberlanjutan sebagai bagian dari budaya dan identitas organisasinya. Laporan keberlanjutan bukan lagi hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen strategis dalam membangun reputasi dan hubungan jangka panjang yang kuat dengan masyarakat. Dengan demikian, dalam penelitian ini, teori legitimasi digunakan untuk menjelaskan bahwa kualitas laporan keberlanjutan merupakan

hasil dari strategi perusahaan dalam merespons ekspektasi guna mempertahankan kepercayaan publik dan loyalitas sosial.

2.1.2 Teori Agensi

Teori agensi diperkenalkan oleh Jensen & Meckling (1976) yang menjelaskan hubungan antara dua entitas utama dalam perusahaan, yaitu prinsipal sebagai pemilik modal dan agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan atas nama prinsipal. Hubungan ini dibentuk melalui perjanjian kontraktual yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak (Kamil et al., 2022). Namun, hak ini sering kali mengalami ketidakseimbangan karena timbulnya perbedaan kepentingan serta ketimpangan informasi di antara prinsipal dan agen.

Seperti yang dijelaskan oleh Chen (2023), konflik kepentingan muncul karena agen cenderung memaksimalkan kepentingan pribadinya, seperti peningkatan kompensasi atau jabatan tanpa mempertimbangkan kepentingan jangka panjang pemilik modal. Situasi ini diperparah dengan asimetri informasi, yaitu kondisi ketika agen mempunyai informasi yang lebih banyak atau lebih akurat dibandingkan prinsipal. Menurut Tseng et al. (2020), dalam situasi ini agen berpotensi melakukan tindakan oportunistik yang dapat merugikan prinsipal, termasuk dalam praktik pengungkapan informasi yang manipulatif atau tidak lengkap.

Untuk meminimalkan potensi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal, teori agensi menekankan pentingnya keberadaan mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa informasi yang disampaikan manajemen disusun secara objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, mekanisme pengawasan tersebut tercermin melalui keberadaan *assurance sustainability report*, yaitu proses verifikasi independen atas laporan keberlanjutan yang bertujuan meningkatkan kredibilitas, akurasi, serta keandalan informasi yang diungkapkan perusahaan. Melalui *assurance sustainability report*, laporan keberlanjutan tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi simbolik, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban yang dapat diuji dan dipercaya oleh pemangku kepentingan. Keberadaan *assurance sustainability report* berperan sebagai mekanisme pengendalian eksternal yang mampu mengurangi asimetri informasi antara agen dan prinsipal, sekaligus memperkecil peluang manajemen untuk menyampaikan informasi yang bias, manipulatif, atau menyesatkan.

Di sisi lain, kinerja keuangan juga menjadi indikator penting yang mencerminkan sejauh mana agen mampu mengelola sumber daya perusahaan secara efektif sesuai dengan kepentingan pemilik modal. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang baik memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mendukung praktik pelaporan keberlanjutan yang berkualitas, termasuk dalam pembiayaan proses *assurance*, penguatan sistem pelaporan, serta penerapan program keberlanjutan yang lebih terstruktur. Dengan demikian, kinerja keuangan tidak hanya merefleksikan kemampuan ekonomi perusahaan, tetapi turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas informasi non-keuangan yang disampaikan dalam laporan keberlanjutan.

Selain itu, tekanan pemangku kepentingan berperan sebagai faktor eksternal yang mendorong perusahaan untuk bertindak lebih transparan dan akuntabel dalam mengungkapkan informasi keberlanjutan. Semakin kuat tuntutan dari regulator, investor, konsumen, dan masyarakat, semakin besar pula dorongan bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan serta memastikan bahwa laporan tersebut telah melalui proses verifikasi independen yang memadai. Tekanan ini secara tidak langsung memperkuat peran *assurance sustainability report* sebagai instrumen yang menjamin keandalan informasi keberlanjutan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas perusahaan. Dengan demikian, dalam perspektif teori agensi, keberadaan *assurance sustainability report*, dukungan kinerja keuangan yang baik, dan tekanan pemangku kepentingan yang kuat secara bersama-sama berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi, memperkuat pengawasan terhadap manajemen, serta meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang kredibel dan dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan.

2.1.3 Kualitas Laporan Keberlanjutan

Sustainability Report atau laporan keberlanjutan merupakan laporan yang disusun oleh suatu perusahaan untuk mengungkapkan kinerja dan dampaknya terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, menurut *Global Reporting Initiative* (GRI), laporan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terhadap para pemangku kepentingan melalui penyediaan informasi yang relevan mengenai strategi dan capaian keberlanjutan organisasi. Standar *GRI* memberikan pedoman internasional yang komprehensif

untuk memastikan bahwa laporan yang disusun dapat dibandingkan secara global dan mencerminkan praktik keberlanjutan yang substansial (Choy, 2023).

Kualitas laporan keberlanjutan memiliki konsep yang berbeda dengan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan berfokus pada karakteristik informasi keuangan yang relevan dan andal untuk pengambilan keputusan ekonomi, sedangkan kualitas laporan keberlanjutan menitikberatkan pada sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi ekonomi, sosial, dan lingkungan (ESG) secara transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kualitas laporan keberlanjutan tidak hanya mencerminkan kinerja finansial perusahaan, tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan dalam menyampaikan dampak dan tanggung jawab keberlanjutannya kepada pemangku kepentingan.

Kualitas yang tinggi tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap standar pelaporan, tetapi juga menunjukkan komitmen perusahaan dalam menjadikan keberlanjutan sebagai bagian inti dari strategi bisnisnya. Nurfaidah et al. (2024), Rusu et al., (2024) dan Pombinho et al. (2024) berpendapat ada empat elemen utama yang menjadi indikator kualitas laporan keberlanjutan.

1. **Kelengkapan informasi**, mencakup sejauh mana perusahaan mengungkapkan informasi secara komprehensif mengenai semua dimensi keberlanjutan, termasuk dampaknya terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial. Informasi yang lengkap memungkinkan pemangku kepentingan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kinerja dan risiko keberlanjutan yang dihadapi oleh perusahaan.
2. **Akurasi data**, menunjukkan ketepatan dan keandalan informasi yang diungkapkan dalam laporan. Data yang akurat sangat penting untuk mempertahankan kredibilitas perusahaan dan menjadi dasar bagi *stakeholder* dalam pengambilan keputusan yang tepat. Kualitas data yang tinggi mendukung upaya perusahaan dalam mengelola dampak sosial dan lingkungan secara transparan, serta memastikan bahwa perusahaan tidak terlibat dalam praktik pengungkapan yang manipulatif.
3. **Kepatuhan terhadap standar internasional**, menunjukkan sejauh mana perusahaan mengikuti kerangka kerja pelaporan internasional seperti *GRI Standards* atau *International Integrated Reporting Council (IIRC)*. Kepatuhan

ini menjamin komparabilitas dan kredibilitas laporan antar perusahaan dan lintas waktu.

4. **Kejelasan dan keterbacaan laporan**, laporan yang baik harus disusun dalam susunan yang jelas, sistematis, dan dapat dipahami dengan jelas oleh beragam pemangku kepentingan termasuk investor, regulator, pelanggan, dan masyarakat umum. Penggunaan bahasa yang lugas, visualisasi data yang informatif, dan struktur yang terorganisasi akan meningkatkan efektivitas komunikasi informasi keberlanjutan. Laporan yang mudah dipahami memungkinkan pemangku kepentingan untuk lebih mudah mengambil keputusan yang berdasarkan informasi yang valid dan akurat.

Pada penelitian ini, kualitas laporan keberlanjutan dinilai berdasarkan *GRI Standards 2021*, yaitu kerangka kerja terbaru yang dirancang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelaporan modern dan mencerminkan konteks keberlanjutan organisasi secara lebih nyata dan terfokus pada dampak material. Selanjutnya menurut Prasetyo et al. (2024), penerapan *GRI Standard 2021* dapat meningkatkan kualitas laporan karena mampu menyajikan informasi yang lebih transparan, akuntabel, dan relevan terhadap ekspektasi *stakeholder*. *GRI Standards* terdiri atas tiga struktur utama, yaitu *Universal Standards*, *Sector Standards*, dan *Topic Standards*, yang secara bersama-sama memastikan bahwa laporan keberlanjutan disusun secara sistematis dan berbasis dampak. Penerapan standar ini tidak hanya meningkatkan kualitas substansi laporan, tetapi juga memperkuat integritas dan kredibilitas informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan (Choy, 2023).

2.1.4 Assurance sustainability report

Assurance sustainability report merupakan bentuk evaluasi yang dilakukan pihak ketiga independen pada laporan yang disusun perusahaan, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap keandalan informasi yang disajikan. Menurut Ardi & Meiden (2023), *assurance sustainability report* adalah dokumen tertulis resmi yang dikeluarkan oleh penyedia jasa profesional independen yang menyimpulkan apakah suatu laporan, khususnya laporan keberlanjutan yang disusun secara wajar, dapat dipercaya, dan sesuai dengan kriteria pelaporan yang ditetapkan. Dalam konteks penelitian ini, *assurance sustainability report* secara tegas merujuk pada *assurance* atas laporan keberlanjutan (*sustainability report*), bukan audit atas

laporan keuangan. Praktik yang dilakukan bukan audit, melainkan assurance terhadap informasi non-keuangan.

Assurance sustainability report ini umumnya diterbitkan oleh lembaga independen seperti Kantor Akuntan Publik (KAP), firma audit lingkungan, atau lembaga verifikasi spesialis, yang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap isi, metodologi, dan sumber data laporan keberlanjutan. Vinella et al. (2022) menegaskan bahwa peran utama *assurance sustainability report* untuk memberikan penilaian objektif dan independen atas keakuratan, kelengkapan, dan integritas informasi keberlanjutan yang disajikan oleh perusahaan.

Keberadaan *assurance sustainability report* sangat penting dalam konteks pelaporan keberlanjutan. Menurut Aprianto & Meiden (2024), dokumen ini membantu mengurangi ketidakpastian dan risiko informasi, terutama pada aspek yang bersifat non-keuangan dan sulit diverifikasi secara langsung oleh publik. Dengan adanya *assurance sustainability report*, perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas dan legitimasi laporan keberlanjutan di mata investor, regulator, dan masyarakat luas.

Giraldo et al. (2024) menyatakan bahwa *assurance sustainability report* juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat transparansi dan pengambilan keputusan yang berbasis bukti, karena stakeholder akan lebih percaya pada laporan yang telah melewati proses verifikasi eksternal. Hal ini sangat penting terutama dalam menghadapi tuntutan ESG disclosure yang semakin ketat baik di tingkat nasional maupun global.

Assurance sustainability report terhadap laporan keberlanjutan umumnya mengacu pada tiga standar internasional utama.

1. ISAE 3000 (*International Standard on Assurance Engagements*)

Diterbitkan oleh International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), ISAE 3000 digunakan untuk assurance engagements non-keuangan secara umum, termasuk laporan keberlanjutan. Standar ini fokus pada prosedur independen, objektivitas, dan dokumentasi profesional dalam proses penilaian.

2. AA1000AS (*Accountability Assurance Standard*)

Merupakan standar yang lebih spesifik untuk pelaporan keberlanjutan, dengan fokus pada inklusi pemangku kepentingan, materialitas, dan responsivitas terhadap isu ESG. Standar ini lebih banyak digunakan oleh perusahaan yang ingin menekankan partisipasi stakeholder dalam pengungkapan keberlanjutan.

3. ISSA 5000 (*International Standard for Sustainability Assurance*)

Diterbitkan oleh International Federation of Accountants (IFAC) melalui IAASB, ISSA 5000 adalah standar baru yang dikembangkan khusus untuk mengatur assurance atas laporan keberlanjutan secara menyeluruh dan terpadu. Standar ini bertujuan untuk menyatukan praktik assurance sustainability dengan prinsip transparansi, integritas data ESG, dan keterbandingan global. ISSA 5000 menekankan pada pendekatan berbasis risiko dan kerangka kerja materialitas yang selaras dengan standar pelaporan seperti IFRS *Sustainability Standards* dan GRI.

Proses pemberian *assurance sustainability report* melibatkan pemeriksaan terhadap metodologi pelaporan, pengumpulan bukti dokumenter, dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil akhirnya berupa pernyataan tertulis yang dapat berupa *limited assurance* (tingkat keyakinan sedang) atau *reasonable assurance* (tingkat keyakinan tinggi), tergantung ruang lingkup dan pendekatan yang digunakan oleh penyedia jasa *Assurance*. Selain memberikan opini atas laporan, penyedia *assurance* juga dapat menyampaikan catatan temuan dan rekomendasi perbaikan bagi perusahaan.

2.1.5 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan aspek fundamental dalam mengevaluasi kesehatan dan kelangsungan operasional sebuah perusahaan. Menurut Yuliansyah (2020), kinerja keuangan merujuk pada kemampuan perusahaan untuk mengatur dan mendistribusikan sumber daya keuangan dengan optimal untuk tujuan usaha jangka panjang. Senada dengan itu, Krisnawati (2020) menyatakan bahwa kinerja keuangan merujuk pada kondisi keuangan perusahaan dalam kurun waktu tertentu, termasuk di dalamnya proses perolehan dan penggunaan dana.

Secara umum, kinerja keuangan adalah evaluasi menyeluruh atas kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, mengendalikan pengeluaran, serta memaksimalkan efisiensi penggunaan aset dan modal. Analisis terhadap kinerja keuangan yang komprehensif dapat membantu perusahaan mengidentifikasi kelemahan operasional, merumuskan strategi perbaikan, dan meningkatkan daya saing melalui efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan (Tudose et al., 2022a). Penilaian kinerja keuangan suatu perusahaan berbeda-beda, sesuai dengan lingkup aktivitas yang dijalankan perusahaan,

menurut Kadek et al. (2024) secara umum lima aspek utama digunakan dalam mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan.

1. Melakukan evaluasi pada penyajian laporan keuangan yang disusun untuk memastikan bahwa laporan yang dikeluarkan sesuai dengan standar akuntansi yang menerapkan prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam praktik akuntansi agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.
2. Melakukan perhitungan berdasarkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan sesuai dengan analisis yang telah ditetapkan.
3. Membandingkan hasil dari perhitungan yang didapatkan dengan menggunakan metode *time series analysis* (antarwaktu) atau *cross-sectional approach* (antar perusahaan) untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja.
4. Menafsirkan hasil dari analisis untuk mengidentifikasi masalah yang ada, serta untuk mengetahui apakah terdapat kendala atas permasalahan yang dihadapi perusahaan.
5. Setelah masalah diidentifikasi, tahapan selanjutnya adalah menetapkan langkah strategis untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan.

Pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan menggambarkan kemampuan dan kondisi keuangan suatu perusahaan serta untuk membantu dalam mengambil keputusan yang strategis. Selaras dengan pentingnya pengukuran keuangan, Soleman (2022) mengklasifikasikan pendekatan evaluasi kinerja keuangan ke dalam tiga kategori utama.

1. Pendekatan Akuntansi: Berbasis laporan keuangan historis, seperti rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi. Pendekatan ini digunakan secara luas karena datanya objektif dan terstandarisasi.
2. Pendekatan Pasar: Berorientasi pada persepsi dan penilaian pasar modal pada nilai perusahaan. Indikatornya meliputi Tobin's Q, EPS, dan PER, yang mencerminkan ekspektasi investor dan reputasi eksternal.
3. Pendekatan Perseptual: Menilai kinerja berdasarkan persepsi *stakeholder* (manajer, karyawan, pelanggan), sering digunakan dalam konteks keberlanjutan, kepuasan kerja, atau nilai etis organisasi.

Tujuan dari pengukuran kinerja keuangan menurut Susanti & Sandari (2023) adalah untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan mampu mengelola

sumber daya keuangan dan mencapai tujuannya, oleh karena itu kinerja keuangan adalah ukuran yang penting dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dan mengelola sumber daya keuangan secara efektif.

2.1.6 Tekanan pemangku kepentingan

Stakeholder Pressure atau tekanan pemangku kepentingan merujuk pada pengaruh yang diberikan oleh berbagai pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas, kebijakan, dan pengambilan keputusan perusahaan. Para pemangku kepentingan ini mencakup investor, regulator, konsumen, karyawan, masyarakat lokal, media, dan organisasi lingkungan, yang masing-masing memiliki ekspektasi tertentu terhadap praktik keberlanjutan perusahaan (Correa-Garcia et al., 2020). Meskipun pemegang saham seringkali menjadi aktor utama dalam sistem korporasi modern, perusahaan juga bertanggung jawab secara sosial secara lebih luas kepada seluruh pemangku kepentingan yang menerima dampak operasional secara langsung maupun tidak langsung perusahaan. Tekanan yang berasal dari pemangku kepentingan tersebut dapat memengaruhi strategi, kebijakan, serta praktik perusahaan dalam menjalankan prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, tekanan pemangku kepentingan memainkan peran yang penting dalam membentuk arah strategis dan kualitas pelaporan keberlanjutan perusahaan.

Sun et al. (2025) menyatakan bahwa perusahaan yang tidak merespons tekanan dari pemangku kepentingan secara memadai berisiko mengalami kerugian reputasi, kehilangan kepercayaan publik, serta penurunan daya saing. Sebaliknya, perusahaan yang mampu mengelola tekanan tersebut dengan bijak dapat mengubahnya menjadi peluang untuk meningkatkan citra merek, membangun kepercayaan *stakeholder*, serta memperkuat kesinambungan bisnis dalam jangka panjang.

Dalam konteks laporan keberlanjutan, tekanan pemangku kepentingan merupakan salah satu pendorong utama dalam mendorong perusahaan menyusun laporan yang berkualitas. Tekanan ini dapat berupa tuntutan terhadap transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta ekspektasi untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap isu lingkungan dan sosial. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dan ketegasan regulasi, penyusunan laporan keberlanjutan tidak lagi cukup bersifat simbolik, melainkan harus mencerminkan informasi yang akurat, lengkap, dan bermakna (Aly & Badawy, 2024).

Darmawan & Idawati (2024) mengklasifikasikan tekanan pemangku kepentingan ke dalam empat kategori industri, yang masing-masing menghadapi bentuk tekanan yang berbeda.

1. ***Environmental-Sensitive Industry (ESI)***, merupakan industri yang aktivitas operasionalnya berdampak besar terhadap lingkungan, seperti pertambangan, energi, dan kimia. Industri ini berada di bawah sorotan publik dan regulator karena isu polusi, penggunaan sumber daya alam, dan emisi karbon. Oleh karena itu, tekanan untuk mengadopsi praktik keberlanjutan dan menyusun laporan yang transparan sangat tinggi.
2. ***Consumer-Proximity Industry (CPI)***, mencakup industri yang produk atau jasanya langsung digunakan oleh masyarakat, seperti makanan, minuman, dan ritel. Hubungan yang dekat secara fungsional dan psikologis dengan konsumen mendorong perusahaan untuk lebih terbuka dan etis, yang meningkatkan tekanan reputasi dalam penyusunan laporan keberlanjutan semakin besar.
3. ***Investor-Oriented Industry (IOI)***, merupakan Perusahaan menghadapi tekanan dari investor, khususnya terkait transparansi dan kinerja keuangan. Tekanan ini tercermin dalam ekspektasi terhadap kualitas laporan keberlanjutan yang memenuhi standar akuntabilitas dan informasi ESG.
4. ***Employee-Oriented Industry (EOI)***, merujuk pada industri yang sangat bergantung pada tenaga kerja dalam operasionalnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan jasa profesional. Tekanan dari karyawan terhadap perlindungan sosial, pengembangan karir, dan kesejahteraan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan aspek ketenagakerjaan dalam laporan keberlanjutan secara lebih rinci.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, tekanan pemangku kepentingan dikategorikan sebagai variabel dalam penelitian ini. Tekanan tersebut dapat memengaruhi keputusan, intensitas, dan kualitas pengungkapan dalam laporan keberlanjutan. Semakin tinggi tekanan dari pemangku kepentingan, semakin besar dorongan bagi perusahaan untuk menyampaikan laporan yang kredibel, akurat, dan sesuai dengan standar internasional

2.1.7 Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu kerangka kerja yang mengatur serta mengarahkan keterkaitan antara perusahaan dan berbagai

pihak berkepentingan, termasuk investor, manajerial, pekerja, konsumen, dan komunitas lokal (Sabrina & Sadalia, 2021). Tujuan utama dari GCG adalah untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara bertanggung jawab, transparan, serta berfokus pada pencapaian nilai jangka panjang bagi seluruh pihak berkepentingan.

Penerapan GCG yang efektif tidak hanya meningkatkan reputasi perusahaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik, mempertegas akuntabilitas manajerial, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pihak terkait (Rintis, 2020). Selain itu, GCG menjadi fondasi penting dalam membangun struktur pengawasan internal yang kuat, membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko, mematuhi regulasi, dan menjalankan praktik bisnis yang etis. Menurut Muanifah et al. (2023), GCG mencakup lima prinsip utama.

1. **Transparansi:** perusahaan dituntut untuk menyajikan informasi yang akurat, jelas, dan mudah dijangkau oleh pihak-pihak berkepentingan. Ini mencakup keterbukaan dalam laporan keuangan, kebijakan perusahaan, dan tindakan manajemen.
2. **Akuntabilitas:** Setiap keputusan dan tindakan perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini diwujudkan melalui struktur organisasi yang jelas, pengawasan internal dan eksternal, serta evaluasi kinerja secara berkala.
3. **Tanggung Jawab:** Perusahaan harus mematuhi semua regulasi yang berlaku serta bertanggung jawab atas dampak operasional terhadap masyarakat dan lingkungan, termasuk melalui pelaksanaan kebijakan keberlanjutan dan program sosial.
4. **Independensi:** Pengelolaan perusahaan harus dilakukan secara mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak tertentu yang dapat memengaruhi objektivitas pengambilan keputusan. Dewan komisaris dan komite audit memegang peran sentral dalam menjaga prinsip ini.
5. **Kesetaraan dan Kewajaran:** Semua pemangku kepentingan harus diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Perusahaan harus menjamin akses informasi yang merata dan kesempatan yang setara dalam keterlibatan bisnis.

Dengan menerapkan kelima prinsip di atas secara konsisten, perusahaan dapat membangun kepercayaan jangka panjang, meningkatkan efisiensi

operasional, dan menjamin keberlanjutan bisnisnya. Dalam konteks pelaporan keberlanjutan, GCG berperan sebagai mekanisme internal utama yang mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan non-keuangan, termasuk laporan keberlanjutan. Perusahaan dengan praktik GCG yang baik cenderung menghasilkan laporan keberlanjutan yang lebih kredibel, komprehensif dan selaras dengan *standar global seperti Global Reporting Initiative (GRI) dan Sustainability Accounting Standards Board (SASB)* (Sari et al., 2023).

Struktur tata kelola termasuk dewan komisaris independen dan komite audit merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa proses pelaporan dilakukan secara objektif dan bebas dari manipulasi informasi. Adriani & Mahayana (2021) menyatakan bahwa komite audit yang aktif meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan. Temuan serupa dikemukakan oleh Dewi & Widyawati (2023), yang menyatakan bahwa struktur GCG yang kuat berkorelasi dengan laporan keberlanjutan yang lebih rinci dan transparan. Tanjung et al. (2019) berpendapat bahwa frekuensi rapat dewan dan independensi komisaris memiliki pengaruh positif terhadap konsistensi dan kedalaman laporan keberlanjutan.

Penerapan GCG dalam perusahaan berfungsi sebagai strategi untuk menjembatani komunikasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan eksternal. Dengan meningkatnya tekanan dari publik, media, investor, dan regulator, perusahaan dituntut untuk menyusun laporan keberlanjutan yang tidak hanya akurat tetapi juga terpercaya. Dengan demikian, dalam penelitian ini *Good Corporate Governance* diposisikan sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara *assurance sustainability report*, kinerja keuangan, dan tekanan pemangku kepentingan terhadap kualitas laporan keberlanjutan.

2.2 Tinjauan Empiris

Berbagai penelitian telah dilakukan dan relevan dengan topik penelitian ini. Temuan dari studi-studi tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keberlanjutan dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Tiga variabel utama yang sering diteliti meliputi *Assurance sustainability report*, Kinerja Keuangan dan Tekanan Pemangku Kepentingan sebagai faktor yang mempengaruhi. Meskipun demikian, berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan adanya ketidakkonsistenan, yang

mencerminkan bahwa kajian ini bersifat dinamis dan terus berkembang untuk memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh.

Pada studi García-Sánchez et al. (2022) melakukan penelitian mengenai peran *assurance* dalam meningkatkan kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan di Eropa. Penelitian ini menegaskan bahwa perusahaan yang menyertakan *assurance sustainability report* dalam laporan keberlanjutan cenderung memiliki tingkat pengungkapan yang lebih tinggi, lebih rinci, dan lebih selaras dengan standar internasional seperti Global Reporting Initiative (GRI).

Studi Ebenhaezer & Rahayu (2022) membahas mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan pada perusahaan sektor keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa profitabilitas dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap laporan keberlanjutan, sementara solvabilitas berpengaruh positif.

Sejalan dengan temuan tersebut, Hazaea et al. (2022) meneliti pengaruh *assurance* terhadap kualitas laporan keberlanjutan pada perusahaan publik di kawasan Timur Tengah. Studi ini mengungkapkan bahwa keberadaan *assurance sustainability report* memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kredibilitas laporan keberlanjutan. Perusahaan yang menggunakan jasa *assurance* independen menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik terhadap indikator keberlanjutan, serta keterbukaan yang lebih luas dalam menjelaskan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas operasional perusahaan

Namun demikian, hasil yang berbeda ditemukan oleh Erin et al. (2022) yang menyatakan bahwa *assurance sustainability report* tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Dalam penelitiannya, *assurance* masih cenderung diposisikan sebagai formalitas untuk memenuhi tuntutan regulasi dan reputasi perusahaan, sehingga belum mencerminkan peningkatan kualitas substansial dalam pengungkapan laporan keberlanjutan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan *assurance sustainability report* tidak secara otomatis menjamin kualitas laporan keberlanjutan yang lebih baik, terutama apabila pelaksanaannya tidak didukung oleh komitmen internal perusahaan dan sistem tata kelola yang kuat.

Sriningsih & Wahyuningrum (2022) meneliti pengaruh tekanan pemangku kepentingan secara komprehensif dan GCG terhadap kualitas laporan

keberlanjutan dan menyimpulkan bahwa perusahaan yang dekat dengan konsumen, bergerak di industri yang sensitif terhadap lingkungan, dan memiliki visibilitas media tinggi lebih cenderung menghasilkan laporan keberlanjutan yang berkualitas tinggi. Namun, tekanan dari kreditur, pemerintah, serta keberadaan komite audit tidak menunjukkan pengaruh. Selain itu, perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 atau memiliki jumlah dewan komisaris yang besar justru cenderung memiliki kualitas pelaporan yang lebih rendah. Erin et al. (2022), melalui analisis terhadap perusahaan-perusahaan di Nigeria, menyimpulkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang kuat meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan.

Bakti & Nengzih (2023) meneliti pengaruh kinerja keuangan, karakteristik perusahaan, dan GCG terhadap kualitas laporan keberlanjutan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan menyimpulkan bahwa kinerja keuangan (yang diukur menggunakan ROA), keberadaan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Sebaliknya, ukuran perusahaan tidak berpengaruh.

Hasil serupa juga disampaikan Silvana & Khomsyiah (2023), yang menemukan bahwa industri yang sensitif terhadap lingkungan serta kinerja keuangan (ROA) mampu meningkatkan kualitas laporan keberlanjutan. Sementara itu, variabel seperti kedekatan industri dengan konsumen, orientasi terhadap karyawan, dan orientasi terhadap investor tidak menunjukkan pengaruh. Selain itu, tingkat utang yang tinggi (DER) justru menurunkan kualitas pelaporan.

Darmawan & Idawati (2024) menganalisis pengaruh tekanan pemangku kepentingan dan struktur kepemilikan terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Hasilnya menunjukkan bahwa tekanan pemangku kepentingan dan GCG berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keberlanjutan. Industri yang sensitif terhadap lingkungan, berorientasi pada karyawan, serta perusahaan dengan dewan komisaris independen menunjukkan pengaruh positif terhadap kualitas laporan. Sebaliknya, industri berorientasi pada investor, keberadaan komite audit, serta kepemilikan manajerial tidak menunjukkan pengaruh. Menariknya, dewan direksi justru memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas pelaporan. Hasil ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Natha dan Putri (2024), yang menunjukkan bahwa tekanan dari konsumen dan pemegang saham memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan, sementara tekanan dari karyawan berdampak negatif.

Suheri (2024) meneliti pengaruh keterlibatan karyawan, kreditur, pemerintah, dan konsumen terhadap kualitas pelaporan keberlanjutan di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya keterlibatan pemerintah yang berpengaruh positif, sementara keterlibatan dari karyawan, kreditur, dan konsumen tidak berpengaruh.

Pambudi & Cahyono (2024) melakukan analisis mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap laporan keberlanjutan pada perusahaan ritel yang tercatat di BEI. Dan mendapati hasil bahwa pertumbuhan penjualan, utang perusahaan, dan likuiditas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Hanya ukuran perusahaan yang ditemukan berpengaruh terhadap kualitas pelaporan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tekanan pemangku kepentingan, GCG, dan kinerja keuangan merupakan variabel penting yang dapat memengaruhi kualitas laporan keberlanjutan.